



Peran Keraton Cirebon dalam Pembentukan Identitas Nasional pada Masa Kemerdekaan Indonesia: Analisis Politik Islam dan Nilai Nasionalisme

The Role of the Cirebon Palace in Shaping National Identity During Indonesia's Independence Era: An Analysis of Islamic Politics and Nationalist Values

Muhammad Sungaidi & Aktobi Ghozali

Abstract: *This article explores the role of the Cirebon Keraton in shaping Indonesia's national identity through the lens of Islamic politics and nationalist values. Based on interviews and historical data from the Cirebon Sultanate, the article analyzes how the sultans, particularly Sultan Muhammad Nurus, chose to align with the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) rather than maintain an independent kingdom. Using an Islamic political framework that emphasizes the concepts of khilafah (leadership), syura (consultation), adalah (justice), and masalah (public welfare), the article demonstrates how the Cirebon Keraton's decision reflects a commitment to unity, social justice, and the welfare of the people. The findings reveal that the Keraton's role, both through diplomacy and contributions to the independence movement, has become an integral part of Indonesia's pluralistic and inclusive national identity. This article also presents an analysis of the relationship between the central government and local entities in maintaining national stability and preserving cultural and political values.*

Keywords: Cirebon Sultanate; Islamic politics; national identity; masalah.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0); <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Abstrak: Artikel ini membahas peran Keraton Cirebon dalam pembentukan identitas nasional Indonesia melalui perspektif politik Islam dan nilai-nilai nasionalisme. Mengacu pada hasil wawancara dan data sejarah Kesultanan Cirebon, artikel ini menganalisis bagaimana para sultan, terutama Sultan Muhammad Nurus, memilih untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) daripada mempertahankan status kerajaan yang independen. Dengan pendekatan politik Islam yang menyoroti konsep khilafah (kepemimpinan), syura (musyawarah), adalah (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan umum), artikel ini menguraikan bagaimana keputusan Keraton Cirebon mencerminkan komitmen terhadap persatuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Temuan menunjukkan bahwa peran Keraton Cirebon, baik melalui diplomasi maupun kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, menjadi bagian integral dari identitas nasional yang plural dan inklusif. Artikel ini juga menyajikan analisis hubungan antara pemerintah pusat dan entitas lokal dalam menjaga stabilitas nasional serta pelestarian nilai-nilai budaya dan politik.

Kata Kunci: Kesultanan Cirebon; Politik Islam; Identitas nasional; masalah.

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara multi kultural yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan awalnya merupakan kerajaan-kerajaan yang berbeda dengan sultan yang memimpin setiap wilayahnya. Hanya saja, karena memiliki kesamaan nasib pernah dijajah oleh Belanda, sehingga kemudian mengikrarkan diri untuk menjadi sebuah negara kesatuan. Sejarah mencatat, kebesaran Kerajaan-kerajaan di nusantara yang menjadi cikal bakal berdirinya Indonesia, seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Ternate, Samudra Passai, dan lain sebagainya.¹ Hingga saat, tercatat ada 20 keraton yang masih eksis dan mengadakan Festival Keraton Nusantara (FKN) untuk pertama kalinya pada tahun 1995 di Yogyakarta.²

Pada saat Indonesia merdeka, di Pulau Jawa terdapat beberapa kesultanan, di antaranya: Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. (IDN Times, 2020). Tiga kesultanan tersebut sampai sekarang masih ada dan menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bersatunya kerajaan-kerajaan tersebut, tentunya merupakan sesuatu yang istimewa, mengingat jika menengok ke daratan Eropa, yang terdiri dari negara-negara kecil yang dipimpin oleh raja atau ratu, meskipun rumpun mereka sama, tetapi tidak dapat bersatu menjadi sebuah negara kesatuan. Hal ini berbeda pula dengan negara tetangga seperti Malaysia, yang masih memberikan kekuasaan secara bergiliran untuk memimpin negara bagi 9 kesultanan yang ada.³ Fenomena semacam ini tentunya menarik untuk diteliti, sehingga dapat diketahui, peran para sultan yang berkuasa di suatu wilayah dalam merajut, menjaga dan mempersatukan negara Indonesia. Fungsi-fungsi kebangsaan yang dipraktikkan oleh para sultan patut menjadi pelajaran dan terus dikembangkan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Jika dianalisis melalui pendekatan politik Islam, persatuan kerajaan-kerajaan di Indonesia ini mencerminkan konsep *khilafah* (kepemimpinan) yang diterapkan secara inklusif, di mana para Sultan berperan dalam menjaga stabilitas dan keutuhan wilayah. Keputusan untuk bersatu demi kepentingan bangsa merupakan manifestasi dari tanggung jawab seorang pemimpin Islam untuk menjaga kemaslahatan umat.

Luasnya wilayah, perbedaan budaya dan kurang meratanya pembangunan, terkadang bisa menyebabkan munculnya disintegrasi. Seperti yang terjadi di Aceh dan Papua, yang beberapa kali melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri dari NKRI. Namun dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, telah mampu meredam keinginan pemisahan diri tersebut.⁴ Pemberian otonomi khusus ini ternyata menimbulkan masalah baru berupa keinginan beberapa daerah untuk mendapatkan otonomi khusus pula. Wacana semacam ini merupakan benih dari perpecahan yang dapat meregangkan persatuan bangsa, sebab jika semua daerah merasa memiliki kelebihan atau keistimewaan atas daerah yang lainnya, dan enggan mengikuti hukum bersama, maka lama-kelamaan persatuan bangsa akan menjadi renggang.

Dalam konteks ini, konsep *syura* (musyawarah) dalam politik Islam dapat diterapkan sebagai solusi untuk menjaga persatuan. *Syura* mengajarkan pentingnya pengambilan keputusan melalui konsultasi dan dialog dengan seluruh pihak terkait, agar setiap kebijakan yang diambil dapat memenuhi kepentingan bersama dan mencegah munculnya potensi perpecahan. Dialog antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi bentuk musyawarah untuk menciptakan solusi yang adil dan sesuai dengan semangat persatuan nasional.

Munculnya keinginan untuk mendapatkan hak Istimewa seperti yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia beberapa waktu lalu,⁵ perlu dicermati dan cukup mengawatirkan, sebab jika itu disetujui, maka bukan tidak mungkin akan muncul usulan lainnya dari beberapa wilayah yang asalnya adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang Sultan. Mengingat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu yang sangat penting,⁶ maka mengetahui bagaimana peran para sultan dalam mewujudkan fungsi-fungsi kebangsaan dan mengajak rakyatnya untuk bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, perlu diungkap, agar dapat menjadi pelajaran bagi generasi penerus bangsa bahwa para leluhur mereka telah berjuang dengan mengorbankan darah, nyawa dan keinginan untuk berkuasa demi persatuan bangsa dan kesejahteraan bersama. Sebab jika para sultan pada waktu kemerdekaan ingin tetap menjadi raja yang berkuasa, tentunya di Indonesia akan berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing berkuasa atas wilayahnya.

Atas dasar latar belakang tersebut, pembahasan ini sangat penting untuk dilakukan. Kajian mengenai peran Keraton Cirebon dalam konteks nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan memiliki signifikansi yang penting dalam beberapa aspek.

Pertama, kajian ini memberikan kontribusi pada pemahaman sejarah nasional dengan menggali peran keraton sebagai elemen penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Kedua, kajian ini memperluas perspektif mengenai konsep nasionalisme dengan mengaitkannya dengan entitas lokal seperti keraton. Pemahaman bahwa nasionalisme dapat tumbuh dan berkembang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk lembaga adat seperti keraton, membuka ruang untuk apresiasi terhadap keragaman dan pluralitas dalam menciptakan kesatuan nasional. Oleh karena itu, kajian ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan memahami peran entitas lokal dalam konteks nasional. Ketiga, kajian ini memberikan landasan historis untuk memahami dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan entitas lokal, menggambarkan kompromi dan diplomasi sebagai model yang dapat diadopsi untuk menangani konflik dan membangun hubungan yang kuat antarwilayah. Implikasi ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan keragaman budaya dan politik di Indonesia, memperkuat kerangka kerja untuk memahami sejarah lokal dalam sejarah nasional.

Artikel ini mengisi kesenjangan penelitian dalam literatur tentang peran politik Islam di Cirebon, khususnya dalam konteks pembentukan identitas nasional Indonesia. Meskipun studi tentang politik Islam di Indonesia umumnya berfokus pada pusat-pusat kekuasaan seperti Kesultanan Yogyakarta atau Demak, sedikit perhatian yang diberikan pada peran Keraton Cirebon. Padahal, Cirebon memiliki sejarah politik yang signifikan. Artikel ini menawarkan wawasan baru tentang bagaimana politik Islam di Keraton Cirebon berbeda dengan kesultanan lain di Indonesia. Sementara kesultanan lain mungkin mempertahankan otonomi atau menuntut status istimewa, Keraton Cirebon menunjukkan pendekatan politik Islam yang inklusif, mengutamakan persatuan, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat. Dengan menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam, seperti keadilan dan maslahat, diterapkan dalam keputusan politik di Cirebon, artikel ini memperkaya literatur politik Islam di Indonesia dengan menambahkan dimensi lokal dan regional yang sering terabaikan.

Hasil dari temuan ini akan menjadi salah satu kunci untuk menyelesaikan berbagai konflik di daerah, karena sejarah sebagai pengetahuan budaya dan sebagai ilmu sosial dapat menggugah kesadaran, sebab mencakup konsep dan nilai budaya seperti pahlawan, rela berkorban, persatuan bangsa, dan kemanusiaan. Untuk memahami sejarah sebagai kenyataan hidup manusia yang kompleks, perlu diingat bahwa sejarah adalah ilmu sosial dan merupakan bagian dari ilmu sosial. Artinya, kenyataan hidup manusia mencakup semua interaksi yang melibatkan individu, struktur, dan komunitas yang berlangsung dari masa lalu hingga saat ini, yang dapat dipahami secara sistematis.⁷ Keunikan masing-masing bangsa dalam membentuk nilai nasionalismenya, bisa menjadi nafas dalam penulisan sejarah, sebagai obat

penawar yang paling ampuh terhadap pembentuk-pembentuk sistem (*System builders*), dan sangat bermanfaat bagi para ahli ilmu sosial dalam mencari solusi penyelesaian berbagai persoalan, yang hasilnya akan memberi manfaat pada kehidupan manusia yang sangat kompleks.⁸

Konsep Politik Islam

Politik Islam adalah cabang dari pemikiran Islam yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan politik dan tata kelola masyarakat. Secara historis, politik Islam memiliki peran penting dalam membentuk tatanan sosial dan pemerintahan di banyak wilayah dunia, termasuk Indonesia. Esensi dari politik Islam adalah bagaimana ajaran Islam, yang mencakup nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan umum, diterapkan dalam mengelola masyarakat dan pemerintahan.⁹

Beberapa konsep utama yang menjadi landasan politik Islam adalah *khilafah* (kepemimpinan), *syura* (musyawarah), *adalah* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum).¹⁰ *Khilafah* merupakan konsep yang menekankan bahwa kepemimpinan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan taat kepada Allah, dengan tujuan melindungi dan memajukan kesejahteraan umat. *Syura*, atau musyawarah, menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan, di mana para pemimpin diharapkan untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan. *Adalah* mengacu pada keadilan sosial, yang harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pemerintah, memastikan bahwa semua orang mendapatkan hak-hak mereka secara adil. Sementara itu, *maslahah* merujuk pada kesejahteraan umum, di mana setiap kebijakan atau tindakan harus berfokus pada kebaikan bersama, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu.

Dalam konteks sejarah Indonesia, konsep-konsep politik Islam ini tercermin dalam berbagai peristiwa penting yang melibatkan para sultan dan kerajaan di Nusantara. Salah satu contoh nyata dari penerapan politik Islam di Indonesia adalah keputusan yang diambil oleh beberapa kesultanan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah kemerdekaan. Keraton Cirebon, yang memiliki sejarah panjang dalam politik dan penyebaran Islam di Jawa Barat, merupakan salah satu kesultanan yang memilih untuk mendukung persatuan Indonesia.

Penggabungan kesultanan-kesultanan dengan NKRI menunjukkan penerapan prinsip *maslahah*, di mana kepentingan umum bangsa diprioritaskan di atas kepentingan pribadi atau lokal. Selain itu, sikap para sultan yang mengutamakan dialog dan musyawarah dengan pemerintah pusat menunjukkan bahwa *syura* tetap menjadi bagian penting dari politik Islam, bahkan di era modern. Para pemimpin Islam di Nusantara tidak hanya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam tata kelola masyarakat

mereka, tetapi juga dalam hubungan mereka dengan entitas nasional dan internasional.

Melalui artikel ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana konsep politik Islam tidak hanya membentuk sejarah lokal, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia yang plural dan inklusif.

Sejarah Singkat Kesultanan Cirebon

Keraton Cirebon merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa Barat yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat sekitarnya. Kesultanan Cirebon terdiri dari 4 keraton; 1) Kasepuhan, 2) Kanoman, 3) Keprabonan, 4) Kacirebonan. Dari keempat keraton tersebut, yang memiliki peran dalam politik dan pemerintahan hanya dua, yakni Kasepuhan dan Kanoman. Pada masa kemerdekaan, pemerintah RI melihat bahwa kekuatan politik Cirebon ada pada Kanoman, sebagai sebuah institusi yang mempunyai hak atas kekuasaan di Cirebon, meskipun disebutnya anom atau muda, tetapi lebih memiliki otoritas. Keempat keraton tersebut sampai sekarang masih ada dan hubungan di antara mereka hanya kaitan persaudaraan, dan bersama-sama dalam mengurus astana gunung jati. Tapi otoritas tertinggi berada pada keraton kanoman, dan yang mengeluarkan surat keputusan pengurus juga dari kanoman.¹¹

Dalam konteks politik Islam, pengaruh Keraton Cirebon yang besar dalam masyarakat serta peran Sultan sebagai pemimpin adat dapat dianalisis melalui konsep *khilafah*. Dalam politik Islam, *khilafah* mengacu pada kepemimpinan yang bertanggung jawab atas umat, dengan tugas utama untuk menegakkan hukum Islam dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, meskipun Sultan Cirebon tidak lagi memegang kendali politik formal, ia masih dihormati sebagai pemimpin spiritual dan adat yang memimpin komunitasnya berdasarkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. *Khilafah* juga menuntut seorang pemimpin untuk menjaga stabilitas dan keutuhan masyarakat, yang terlihat dalam bagaimana Keraton Cirebon tetap berperan dalam memelihara harmoni di wilayahnya.

Kesultanan Cirebon, meskipun masih ada rajanya, tetapi tidak menjalankan aktivitas pemerintahan, sultan sebagai kepala pemerintahan, hanya memimpin struktur adat di wilayah Cirebon, seperti sistem adat pengurusan makam atau sultan adalah pemangku adat, dan pelaksanaannya oleh pangeran patih. Pada saat penelitian, keadaan Sultan sedang sakit, sehingga pelaksana semua kegiatannya adalah pangeran patih raja Muhammad Qodiran, dengan ketentuan pada setiap akan melaksanakan tugas harus melaporkan kepada Sultan. Meskipun sudah tidak memiliki posisi dalam pemerintahan secara resmi, dan status keraton saat ini sebagai pengelola adat, statusnya masih dihormati dan dipandang sebagai sesepuh di wilayah

Cirebon, sehingga ketika ada pergantian kapolres, kapolsek dll., mereka selalu datang menghadap ke keraton.¹²

Konsep *'adalah* (keadilan) dalam politik Islam juga tercermin dalam peran Sultan Cirebon. Meskipun tidak memiliki kekuasaan politik formal, Sultan tetap berperan sebagai pemimpin yang adil dalam konteks adat dan sosial. Keadilan dalam Islam mengharuskan seorang pemimpin untuk berlaku adil terhadap semua anggota masyarakat, baik dalam hukum, pembagian hak, maupun dalam menjaga keseimbangan sosial. Sultan Cirebon menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemerintah pusat, menunjukkan bahwa prinsip *'adalah* tetap dipraktikkan dalam upaya menjaga stabilitas dan keseimbangan antara kepentingan lokal dan nasional.

Dalam politik Islam, peran Sultan Cirebon sebagai pemimpin adat yang tetap dihormati meski tidak memiliki kekuasaan politik formal mencerminkan *'adalah* (keadilan). Sultan Cirebon memimpin dengan adil sesuai dengan peran adatnya dan tetap menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah pusat dan masyarakatnya. Prinsip keadilan Islam terlihat dalam bagaimana sultan menjaga harmoni dan stabilitas di Cirebon, meskipun otoritas politik telah beralih ke pemerintah.

Kegiatan keraton Cirebon saat ini, selain mengurus bidang adat, juga mengurus tanah-tanah yang tersisa yang ada surat-suratnya. Sedangkan yang ada di wilayah seperti tasik, dll., belum ditindaklanjuti, karena prosesnya memakan banyak waktu. Tanah dan Situs milik keraton sekarang diambil alih oleh desa, yang awalnya dalam status sewa praja berubah menjadi eks sewa praja. banyak juru kunci yang tidak melaporkan status tanah, dan tidak bisa diperjual belikan, mereka hanya hak guna pakai, tetapi sebagian hasil tanahnya, seperti pohon jati, masih digunakan untuk keraton.¹³

Dalam konteks *syura* (musyawarah), Kesultanan Cirebon mengajarkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. *Syura* adalah prinsip penting dalam politik Islam yang menekankan pada partisipasi kolektif dan konsultasi dalam membuat keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Hubungan antara keraton dengan pemerintah pusat dan masyarakat Cirebon dijaga melalui dialog dan musyawarah, yang memastikan bahwa kepentingan adat tetap dihormati dan dipertimbangkan dalam konteks nasional. Prinsip *syura* ini memungkinkan terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan otoritas lokal dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Kesultanan Cirebon bermula ketika Sunan Gunung Jati tiba di wilayah tersebut pada tahun 1479. Pada saat itu, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan Cirebon kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Ampel, sebagai pemimpin para wali di Pulau Jawa, memberikan pengakuan kepada Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin agama Islam di Sunda sekaligus Tumenggung Cirebon. Setelah itu, banyak tokoh-tokoh Islam terkenal seperti Syekh Datuk Khafi, Syekh Majagung, Pangeran

Kejaksan, dan para Ki Gedeng lainnya, menyerahkan pengikut mereka kepada Sunan Gunung Jati.¹⁴ Karena perannya sebagai pemimpin agama sekaligus penguasa, Sunan Gunung Jati dijuluki “Pandita Ratu,” dan dalam tradisi lokal disebut sebagai “Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Penata Agama Awaliya Allah Kutubi Zaman Kholipatur Rosulullah.”¹⁵

Sebagai penguasa, Sunan Gunung Jati memperkuat kekuasaannya dengan membangun aliansi dengan Kesultanan Demak,¹⁶ dan kekuatan Islam lainnya, serta memisahkan diri dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Salah satu tindakan pentingnya adalah menghentikan tradisi memberikan upeti berupa garam dan terasi kepada Pajajaran, yang memicu kemarahan raja Pajajaran. Namun, ketika Tumenggung Jagabaya dan pasukannya datang menuntut upeti, mereka malah beralih menjadi pengikut Islam di bawah Sunan Gunung Jati dan menetap di Cirebon.¹⁷

Dengan menghentikan pembayaran upeti, Cirebon berhasil melepaskan diri dari Pajajaran dan menjadi negara yang berdaulat. Langkah ini tidak menghadapi hambatan besar karena kerajaan-kerajaan lain seperti Galuh, Talaga, dan Banten juga tengah berusaha melepaskan diri dari Pajajaran. Selain itu, Sunan Gunung Jati memiliki garis keluarga dengan kerajaan Pajajaran, yakni dari Prabu Siliwangi, sehingga semakin melemahkan posisi Pajajaran. Setelah pembebasan dari Pajajaran, Cirebon berdiri sebagai negara merdeka. Faktor-faktor yang mempermudah kemerdekaan Cirebon antara lain kelemahan Kerajaan Sunda Pajajaran yang mulai kehilangan pengaruhnya, serta dukungan dari para penguasa lokal yang juga ingin melepaskan diri.¹⁸

Pada 1528, Pangeran Pasarean, putra Sunan Gunung Jati, diangkat sebagai pemimpin, sementara Sunan Gunung Jati lebih fokus pada penyebaran agama Islam.¹⁹ Setelah kematian Pangeran Pasarean, menantunya, Fadhillah Khan, memimpin pemerintahan Cirebon, diikuti oleh Pangeran Sawarga sebagai pengganti Sunan Gunung Jati.²⁰ Putra Sunan Gunung Jati, Pangeran Emas, kemudian naik takhta dengan gelar Panembahan Ratu I dan memimpin Kesultanan Cirebon selama 79 tahun. Di bawah pemerintahannya, Cirebon menikmati stabilitas dan kesejahteraan, serta menjalin hubungan dagang dengan kerajaan lain seperti Pajang. Ancaman dari Kerajaan Sunda dan Banten tidak lagi dirasakan, dan pelabuhan Cirebon menjadi pusat perdagangan penting.²¹

Namun, berada di antara dua kerajaan besar, Banten di barat dan Mataram di timur, membuat Cirebon tidak dapat memperluas wilayahnya. Meskipun demikian, baik Banten maupun Mataram tetap menghormati Cirebon. Mataram menganggap Cirebon sebagai sumber spiritual dan guru, sementara Banten menghormati warisan Sunan Gunung Jati.²² Hubungan erat dengan Mataram terlihat saat Panembahan Ratu I diundang ke Mataram pada tahun 1636, dan putri Panembahan Ratu I

menikah dengan Sultan Agung dari Mataram, menghasilkan keturunan yang kelak menjadi Susuhunan Amangkurat I.²³

Panembahan Ratu II, penerus Panembahan Ratu I, menghadapi tantangan ketika Mataram, di bawah Amangkurat I, memintanya membujuk Banten untuk menghentikan serangan terhadap Belanda. Namun, upaya tersebut gagal dan menyebabkan Panembahan Ratu II serta kedua putranya ditahan di Mataram. Pemerintahan sehari-hari di Cirebon kemudian dikelola oleh Pangeran Wangsakerta di bawah pengawasan Mataram. Panembahan Ratu II wafat pada tahun 1667 di Mataram dan dimakamkan di Girilaya, sehingga ia dikenal sebagai Panembahan Girilaya.²⁴

Pada 1677, Cirebon terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Panembahan, yang masing-masing dipimpin oleh keturunan Sunan Gunung Jati. Namun, ketiga penguasa ini bersaing satu sama lain, dan Belanda memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat pengaruh mereka melalui perjanjian politik yang mengikat Cirebon kepada Kompeni Belanda.

Pembagian ini membawa konflik antara para penguasa Cirebon, yang akhirnya melibatkan Kompeni Belanda sebagai penengah. Perjanjian dengan Belanda dibuat pada akhir abad ke-17, yang secara perlahan memberikan Belanda kendali politik dan militer atas Cirebon. Perjanjian-perjanjian tersebut mengatur berbagai aspek pemerintahan, pembagian hasil pelabuhan, hingga pengelolaan upacara adat.²⁵

Pada akhirnya, Belanda semakin menguasai Cirebon, dan melalui perjanjian pada tahun 1681, mereka memperoleh hak monopoli atas perdagangan penting di wilayah tersebut. Pada awal abad ke-18, Kesultanan Cirebon hanya berfungsi sebagai simbol budaya dan spiritual, dengan kekuasaan politik sepenuhnya dikuasai oleh Belanda.²⁶

Potret sejarah Kerajaan Cirebon yang awalnya kuat namun akhirnya kehilangan kekuasaan dan kendali atas sumber daya ekonominya menjadi pelajaran penting. Konflik dan perebutan kekuasaan di antara para pewaris takhta menunjukkan hilangnya prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dalam politik mereka. *Maslahah* mengajarkan bahwa kepemimpinan harus berfokus pada kesejahteraan dan kepentingan umat, bukan keuntungan pribadi. Ketika para pemimpin lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka, seperti yang terjadi dalam perebutan kekuasaan antara para pewaris, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhan Kesultanan Cirebon.

Sikap Nasionalisme Keraton Cirebon

Keraton Cirebon memiliki sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda, baik sebelum maupun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun Keraton Cirebon pada umumnya lebih dikenal karena kontribusinya dalam penyebaran

Islam dan hubungan diplomatis dengan kerajaan-kerajaan lain, perjuangan melawan penjajah Belanda juga merupakan bagian penting dari sejarahnya.

Pada saat Indonesia merdeka, yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta, Kerajaan Cirebon dipimpin oleh Sultan Muhammad Nurus. Seharusnya, dengan berakhirnya penjajahan Belanda yang dilanjutkan Jepang atas wilayah Nusantara, Kerajaan Cirebon menjadi wilayah yang merdeka. Akan tetapi dalam kenyataannya, Cirebon tidak memproklamkan kemerdekaannya, dan memilih bergabung dengan Indonesia yang baru berdiri, setelah penjajahan Belanda dan Jepang berakhir. Pilihan ini mencerminkan sikap kebangsaan Keraton Cirebon, di mana elemen-elemen inklusif dari keraton berperan dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Sikap ini menggambarkan semangat kebangsaan Keraton Cirebon yang meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kerajaan sendiri. Dengan analisis dari perspektif politik Islam, keputusan Keraton Cirebon dapat dipahami lebih dalam dengan mengacu pada konsep-konsep kunci seperti *khilafah* (kepemimpinan), *syura* (musyawarah), *adalah* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum). Beberapa temuan penelitian yang dapat dihubungkan dengan konsep nasionalisme dan kebangsaan dari Keraton Cirebon tergambar sebagai berikut:

a) Komitmen Terhadap Persatuan dan Kemerdekaan Indonesia:

Salah satu landasan utama dalam politik Islam adalah konsep *khilafah* yang merujuk pada kepemimpinan yang bertanggung jawab atas umat, dengan fokus pada menjaga persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Sultan Muhammad Nurus, sebagai seorang pemimpin, menerapkan prinsip *khilafah* dalam tindakannya dengan memprioritaskan kemaslahatan umatnya di atas kepentingan kerajaan. Dalam sejarah, tidak semua kerajaan atau kesultanan di Indonesia mengambil keputusan yang sama seperti Cirebon. Beberapa memilih untuk mempertahankan kedaulatan mereka, yang kadang-kadang menciptakan ketegangan dengan pemerintah pusat. Namun, Sultan Nurus dengan jelas memilih jalan persatuan, yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya persatuan nasional dalam mencapai kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Keraton Cirebon, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Anom Pangeran Raja Adipati Muhammad Nurus, terlibat secara aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Keterlibatan aktif ini mencakup peristiwa pemindahan kursi 'Gading' sebagai simbol kesiapan Keraton Cirebon untuk bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Tindakan itu menunjukkan sikap kompromi dan diplomasi Keraton Cirebon sebagai respons terhadap kedatangan Presiden Soekarno. Pendekatan ini dapat dihubungkan dengan konsep nasionalisme, di mana terdapat semangat rela berkorban dan kesadaran akan pentingnya kesatuan dalam mencapai

kemerdekaan. Hal ini juga menegaskan komitmen Keraton Cirebon terhadap persatuan dan kemerdekaan. Pendekatan kompromi dan diplomasi yang diambil oleh keraton ini dapat menjadi inspirasi dalam menangani konflik serta membangun hubungan yang kuat antarwilayah di Indonesia. Dengan demikian, sejarah peran Keraton Cirebon menjadi bagian integral dari warisan nasional yang mencerminkan pluralitas, semangat rela berkorban, dan kesetaraan, nilai-nilai yang esensial dalam konsep nasionalisme Indonesia.

Penguasa Cirebon pada saat kemerdekaan dan pasca kemerdekaan adalah Sultan Anom Pangeran Raja Adipati Muhammad Nurus. Hal ini dibuktikan dengan adanya foto presiden Soekarno yang bertemu dengan Sultan Nurus Di Purbayaksa. Berdasarkan penjelasan Farikhin (staf keraton Kanoman), bahwa pada mulanya, keraton Cirebon enggan untuk bergabung ke negara kesatuan Republik Indonesia, karena tidak mau tanah-tanah milik keraton akan diambil oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi sejak kedatangan presiden Soekarno tersebut, Raja Nurus kemudian memindahkan kursi 'Gading' yang merupakan singgasana raja Cirebon, hadiah dari Prabu Siliwangi, ke dalam *prabayaksa*, di dalamnya ada *mandi mastaka* dan tidak menggunakannya sebagai singgasana lagi, dan hanya menjadikannya sebagai benda keramat. Dengan memindahkan kursi gading tersebut, kesultanan Cirebon menyatakan bergabung dengan NKRI dan menyatakan berhenti serta tidak akan berperan dalam bidang politik dan pemerintahan. Dari peristiwa tersebut dapat diketahui kepandaian presiden Soekarno dalam diplomasi, sehingga mampu meluluhkan hati Sultan Cirebon. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa Sultan Cirebon menganut budaya Jawa, yang cenderung mengalah ketika didatangi. Tindakan Sultan Nurus juga mencerminkan sikap nasionalisme dari aspek penghormatan terhadap simbol-simbol negara, yang dalam hal ini adalah Presiden Indonesia.

Karena adanya penolakan pada awal kemerdekaan ini, maka hingga kini, Cirebon tidak menjadi daerah Istimewa di Indonesia, seperti Yogyakarta.²⁷ Sikap sultan Cirebon ini menunjukkan adanya nasionalisme yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian sebagai orientasi nilai kehidupan kolektif, dengan fokus pada pembentukan dan pelestarian negara nasional. Tindakan tersebut juga sesuai dengan definisi nasionalisme yang berasal dari kata *nationalism* dan atau *nation*. Dalam bahasa Inggris, kata *nation* merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara. Hans Kohn memberikan terminologi bahwa nasionalisme adalah "state of mind" di mana kesetiaan tertinggi individu diserahkan kepada negara kebangsaan.²⁸ Dengan pernyataan bergabung kepada NKRI, Sultan Cirebon merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia sebagai satu komunitas bersama untuk hidup dalam satu naungan pemerintahan. Dari kejadian itu, tampak juga bahwa Sultan Cirebon memiliki semangat untuk membangun bangsa Indonesia yang mandiri dengan jiwa kesetiakawanan.

Kompromi dan diplomasi yang ditunjukkan oleh Keraton Cirebon, khususnya dalam hal pemindahan kursi ‘Gading’, dapat dijadikan sebagai model untuk menangani konflik pada saat tidak ada kesepakatan di tingkat lokal maupun nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dengan dialog dan kompromi, perbedaan dapat diselesaikan tanpa mengorbankan integritas atau kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Peran Keraton Cirebon dalam mendukung proklamasi kemerdekaan dan bergabung dengan Republik Indonesia menunjukkan kontribusinya terhadap pembentukan identitas nasional.

Selanjutnya, Berkaitan dengan kesediaan Sultan Nurus untuk bergabung dengan NKRI, menimbulkan pertanyaan apakah ada kontrak kerja atau semacam kompensasi untuk bergabungnya Cirebon di bawah naungan NKRI. Namun, hingga kini tidak ditemukan adanya kontrak kerja tersebut. Akan tetapi terdapat Kesaksian Pangeran Raja Win, Anak terakhir sultan Nurus, bahwa Cirebon diberi kompensasi tanah di Papua yang cukup luas, namun sampai sekarang tidak dikelola, karena pihak Kasepuhan, Keprabonan, dan Kacirebonan meminta untuk membeli mobil dan lainnya, yang menyebabkan Sultan Nurus Kesal, sehingga akhirnya membatalkan kompensasi tersebut secara sepihak, dan hingga saat ini keberadaan tanah di Papua tidak diketahui. Di sisi lain tidak diketahui pula apa alasan pemberian kompensasi itu, karena Pangeran Raja Win tidak tertarik untuk melanjutkan pengurusannya.²⁹

Tantangan dan ketidakpastian seputar kompensasi tanah di Papua itu, menunjukkan kompleksitas hubungan antara Keraton Cirebon dan pemerintahan pusat. Implikasinya dapat mencakup perlunya mekanisme yang lebih jelas dan adil dalam menangani masalah kompensasi dan hubungan antara entitas lokal dan pemerintahan pusat. Hal itu juga menunjukkan adanya kesetiaan Cirebon yang tidak ingin menuntut apa pun kepada Pemerintah Pusat, sebagai bentuk kecintaan kepada tanah air.

b) Pernyataan Identitas Nasional Melalui Proklamasi Kemerdekaan:

Peran Keraton Cirebon dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia juga menjadi contoh nyata bagaimana keraton ini terlibat aktif dalam membentuk identitas nasional. Keraton memfasilitasi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di Cirebon pada 16 Agustus 1945, satu hari sebelum proklamasi resmi di Jakarta. Hal ini mencerminkan kesadaran Sultan dan masyarakat Cirebon akan pentingnya menjadi bagian dari gerakan kemerdekaan yang lebih luas. *Maslahah* menjadi landasan utama di sini, di mana Sultan Muhammad Nurus memahami bahwa kepentingan nasional lebih utama dibandingkan kepentingan kerajaan individu.

Dalam hal ini, peran Keraton Cirebon juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membangun *imagined community* sebagaimana dijelaskan oleh Benedict

Anderson, di mana nasionalisme dibangun melalui kesadaran akan kebersamaan dalam identitas. Sultan Muhammad Nurus dan Keraton Cirebon memainkan peran penting dalam mempercepat gerakan kemerdekaan di Cirebon, dengan memberikan tempat dan dukungan bagi proklamasi kemerdekaan di Tugu Kejaksan Cirebon pada 15 Agustus 1945, dua hari sebelum proklamasi di Jakarta. Sikap ini mencerminkan rasa tanggung jawab nasional yang tidak hanya sebatas wilayah Cirebon, tetapi juga pada kesatuan bangsa Indonesia yang baru.³⁰

'adalah (keadilan) sebagai prinsip politik Islam juga terlihat dalam bagaimana Keraton Cirebon memberikan dukungan penuh terhadap proklamasi kemerdekaan ini. Dengan memilih untuk tidak hanya berdiri sebagai entitas yang independen, Keraton Cirebon menunjukkan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia lebih penting daripada kekuasaan kerajaan lokal. *'adalah* dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan yang adil, tetapi juga kesediaan untuk berbagi peran dalam proses pembangunan bangsa yang lebih besar.

Pembacaan teks proklamasi di Cirebon juga memperkuat gagasan bahwa keraton berfungsi sebagai penghubung antara lokalitas dan nasionalisme yang lebih luas. Dalam perspektif politik Islam, hal ini juga sejalan dengan konsep *syura*, di mana pengambilan keputusan besar melibatkan musyawarah dan partisipasi kolektif. Dengan memfasilitasi proklamasi kemerdekaan, Sultan Muhammad Nurus menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya berbagi kekuasaan dan tanggung jawab dengan entitas yang lebih besar, dalam hal ini adalah negara Indonesia yang baru merdeka.

c) Inklusivitas dan Kesetaraan:

Perjuangan keraton Cirebon dalam masa kemerdekaan tidak tampak secara langsung, akan tetapi berbagai perlawanan yang dilakukan oleh para tokoh Cirebon, disinyalir merupakan komando dari sultan. Hal itu disimpulkan dari keadaan para pejuang pada saat mereka tertangkap, atau menyerahkan diri kepada kompeni karena adanya ancaman untuk membumi hanguskan keraton. Dengan demikian, maka tampak dengan jelas bahwa penyerahan diri para pejuang itu adalah dalam rangka menjaga agar keraton tetap ada dan tidak dihancurkan, dan ini menunjukkan bahwa ada peran keraton di balik layar yang memberikan perintah kepada para pejuang tersebut.

Selain itu, perjuangan Cirebon juga banyak dilakukan oleh para Ulama yang mengasingkan diri, dan membuang status bangsawannya agar tidak dikenali oleh pihak kompeni. Para ulama tersebut mendirikan pesantren dan tidak pernah berhenti melakukan perlawanan terhadap penjajah. Beberapa tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan di Cirebon, antara lain adalah:

- 1) Ki Bagus Rangin, seorang ulama dan pemimpin perlawanan rakyat Cirebon melawan penjajah Belanda pada tahun 1808-1813. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang berdakwah untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan moral agama di kalangan masyarakat Cirebon. Ki Bagus Rangin juga merupakan abdi dalem Keraton.³¹
- 2) KH Abbas Abdul Jamil, keturunan Mbah Muqoyyim yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Buntet. Ia merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam perang 10 November di Surabaya, dan dijuluki “Singa dari Jawa Barat”. Mbah Muqoyyim sendiri jika dirunut, memiliki silsilah sampai ke Keraton Cirebon.³²

Keraton Cirebon juga berpartisipasi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi Belanda dan sekutunya. Salah satu contohnya adalah pertempuran laut di Teluk Cirebon pada 5 Januari 1947,³³ yang melibatkan kapal perang Republik Indonesia (KRI) Gajah Mada 408 yang berhadapan dengan kapal perang Belanda.³⁴ Para awak KRI Gajah Mada 408 gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran tersebut. Mereka berhasil menenggelamkan satu kapal Belanda dan melukai dua kapal lainnya, meskipun kapal mereka sendiri juga tenggelam akibat serangan balik Belanda. Perlawanan para awak kapal ini menunjukkan sikap patriotisme. Mereka rela mati, demi negaranya, masa depan bangsanya, karena merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memajukan negaranya

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa tokoh-tokoh lokal, seperti ulama dan pejuang dari Cirebon, terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan sikap patriotisme dari Rakyat Cirebon kepada Negara Indonesia yang baru berdiri. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Patriotisme merupakan jiwa dan semangat cinta tanah air yang melengkapi eksistensi nasionalisme.³⁵

Perjuangan kemerdekaan keraton Cirebon melawan penjajah Belanda juga dilakukan melalui perang terbuka yang disebut dengan perang kancil merah dan perang kedondong. Semua itu, menunjukkan bahwa keraton Cirebon telah ikut terlibat dalam pembentukan NKRI meskipun tidak tampak secara langsung, karena pemimpin dari para pejuang tersebut tidak ada yang menggunakan gelar kebangsawanan. Tidak adanya gelar kebangsawanan di antara pemimpin perjuangan Cirebon mencerminkan partisipasi aktif dan relatif egaliter masyarakat Cirebon. Hal ini dapat dianggap sebagai contoh inklusivitas dan semangat kesetaraan dalam gerakan kemerdekaan. Hans Kohn: seorang sejarawan dan filsuf politik, memandang nasionalisme sebagai suatu fenomena yang kompleks dan berkembang seiring waktu. Dia membedakan antara nasionalisme sebagai ideologi yang dapat bersifat inklusif atau eksklusif. Kohn melihat nasionalisme sebagai suatu kekuatan yang dapat membentuk

identitas nasional dan meresap dalam kehidupan politik. Beberapa indikator yang mencerminkan sikap nasionalisme menurut Hans Kohn dapat tercermin dalam semangat patriotisme, kebanggaan terhadap warisan budaya, dan dorongan untuk mempertahankan otonomi nasional.

Keterlibatan para ulama ini mencerminkan pentingnya *'adalah* dalam politik Islam. Mereka mengesampingkan status sosial mereka demi mencapai kemerdekaan untuk semua lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, perjuangan rakyat Cirebon tidak terbatas pada golongan bangsawan atau elite, tetapi melibatkan semua kalangan masyarakat, baik ulama, pedagang, maupun rakyat biasa. Perlawanan terhadap Belanda melalui perang terbuka, seperti perang kancil merah dan perang kedondong, menunjukkan bahwa masyarakat Cirebon berjuang secara kolektif untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Kesetaraan dalam perjuangan ini mencerminkan prinsip *syura* (musyawarah), di mana setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan arah perjuangan bangsa. Tidak adanya gelar kebangsawanan di antara pemimpin perjuangan dari Cirebon juga memperlihatkan bahwa masyarakat tidak mengandalkan hierarki sosial dalam upaya meraih kemerdekaan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan politik Islam, yang mendorong kesetaraan dan keadilan dalam setiap tindakan politik, termasuk dalam perjuangan kemerdekaan.

Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa Keraton Cirebon memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia melalui komitmen yang kuat terhadap persatuan dan kemerdekaan. Dengan menggunakan perspektif politik Islam, peran nasionalisme Keraton Cirebon tidak hanya merupakan kontribusi historis, tetapi juga mencerminkan penerapan nyata nilai-nilai *khilafah*, *syura*, *'adalah*, dan *maslahah*. Keputusan Sultan Muhammad Nurus untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam, seperti tanggung jawab sosial, keadilan, dan kemaslahatan umum, dapat memandu keputusan politik yang menentukan dalam konteks nasionalisme.

Secara teoretis, artikel ini memperkaya literatur tentang hubungan antara politik Islam dan nasionalisme di Indonesia, dengan menyoroti peran penting Keraton sebagai penghubung antara nilai-nilai keislaman dan pembentukan identitas nasional yang inklusif. Temuan ini menunjukkan bahwa politik Islam tidak hanya relevan dalam pengelolaan kekuasaan, tetapi juga dalam proses pembangunan bangsa, di mana pemimpin mampu menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau politik lokal.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa model kepemimpinan yang dicontohkan oleh Sultan Cirebon dapat menjadi teladan bagi pemimpin modern

dalam menyeimbangkan antara ketaatan terhadap nilai-nilai religius dan kepentingan nasional. Kesadaran akan pentingnya dialog, musyawarah, dan komitmen terhadap persatuan bangsa yang ditunjukkan Keraton Cirebon juga relevan dalam konteks politik kontemporer Indonesia, di mana harmoni sosial dan inklusivitas tetap menjadi tantangan besar. Meskipun Keraton Cirebon tidak lagi terlibat dalam politik formal, peran sejarah dan simboliknya tetap penting dalam mendukung narasi identitas nasional yang berlandaskan pada pluralisme, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Catatan Kaki

1. Ranni Sapitri, "Jejak Emas Sriwijaya dan Majapahit dalam Perdagangan Maritim Asia," *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 28, no. 2 (December 15, 2022): 104–22, <https://doi.org/10.30631/nazharat.v28i2.89>.
2. M. Halwi Dahlan, "Ronggeng Bugis dalam Tinjauan Sejarah Kebudayaan," *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 4, no. 2 (June 1, 2012): 349, <https://doi.org/10.30959/patanjala.v4i2.144>.
3. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Politik (Legislasi) Hukum Islam di Malaysia," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2016): 123–38.
4. Khairul Ikhwan Damanik et al., *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).
5. Muhammad Hidayat, "Analisis Framing Pemberitaan Daerah Istimewa Minangkabau di Media Online Tempo.co," *Komunika* 17, no. 2 (September 1, 2021): 15–29, <https://doi.org/10.32734/komunika.v17i2.7550>.
6. Solihin Ichas Hamid et al., "Implementasi Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan Model Pembelajaran Role Playing di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, no. 6 (November 13, 2021): 5731–38, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1602>.
7. Mantili, "Penerapan Metode Pembelajaran Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Sejarah Di Kelas X SMA PGRI-2 Palangka Raya," *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 2 (2019): 37–47; Setiadi Sulaiman, "Pendekatan konsep dalam pembelajaran Sejarah," *Jurnal Sejarah Lontar* 9, no. 1 (2012): 9–21.
8. Endang Rochmiatun, "Kedudukan Sejarah di Tengah Ilmu-ilmu Lain," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 13, no. 1 (2013).
9. Himyari Yusuf, "Eksistensi Dan Karakteristik Politik Islam Suatu Inspirasi Bagi Formulasi Politik Kontemporer," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 103–20.
10. M. Abdul Aziz, "The Principles of Islamic Polity in the Qur'an and Sunnah: Revisiting Modern Political Discourse," *Al-Burhān Journal of Qur'an and Sunnah Studies* 7, no. 1 (2023): 5–28, <https://doi.org/10.31436/alburhn.v7i1.296>.
11. Farichin, Wawancara, November 15, 2021; Budi Prasidi Jamil, "Perpecahan Keraton Cirebon," *Jurnal KALIJAGA* 2 (July 2013): 33–51; Adeng et al., *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutera* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998).
12. Farichin, Wawancara.
13. Farichin.

14. Wawan Hernawan, "Cirebon Keraton In The Flow of History (1452-1809 AD.)," *Jurnal Lektur Keagamaan* 21, no. 1 (2023): 289–324; Heru Erwantoro, "Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon," *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 4, no. 1 (2012): 170–83, <https://doi.org/10.30959/patanjala.v4i1.130>; Edi S. Ekadjati, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat* (Bandung: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1991).
15. Muhamad Miftah Farid, "Perjuangan Sunan Gunung Djati dalam Penyebaran Islam di Jawa Barat," *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 7, no. 2 (December 30, 2022): 134, <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v7i2.5724>; Ekadjati, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat*; Titan Rohkmutiana Hardhi, "Dakwah Sunan Gunung Jati Dalam Proses Islamisasi Di Kesultanan Cirebon Tahun 1479-1568," *Risalah* 3, no. 11 (2016).
16. E. Suryaman, *Jalan Hidup Sunan Gunung Jati Sejarah Faktual Dan Filosofi Kepemimpinan Seorang Pandhita-Raja* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2015).
17. Siti Fauziah, "Kiprah Sunan Gunung Jati dalam Membangun Kekuatan Politik Islam di Jawa Barat" 13, no. 1 (2015); Atja and Ayatrohaedi, *Carita Purwaka Caruban Nagari: Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah* (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1986).
18. Erwantoro, "Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon"; Toto Sucipto, "Eksistensi Keraton Di Cirebon: Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Keraton-Keraton Di Cirebon," *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research* 2, no. 3 (2010): 472–89.
19. Farihin Farihin, Aah Syafaah, and Didin Nurul Rosidin, "Jaringan Ulama Cirebon Abad ke-19 Sebuah Kajian Berdasarkan Silsilah Nasab dan Sanad," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 7, no. 1 (June 28, 2019), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v7i1.4675>; Ekadjati, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.*, 107-108.
20. Nindia Farah Islamiati, "Strategi Penyebaran Islam Sunan Gunung Jati Melalui Politik Kesultanan Cirebon (1479-1568)" (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023); Ekadjati, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.*, 64.
21. Firlina Tiya Deviani, "Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M.-1755M.)," *Tamaddun* 4, no. 1 (2016): 123–46.
22. Erwantoro, "Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon."
23. Ni Putu Yuniarika Parwati, "Penyerangan Sultan Agungke Batavia Terhadap Kondisi Politik Dan Ekonomi Mataram Tahun 1639-1646," *Social Studies* 2, no. 2 (2014): 36–53; Edi S. Ekadjati, *Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta* (Dunia Pustaka Jaya, 2017).
24. Erwantoro, "Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon"; Jamil, "Perpecahan Keraton Cirebon."
25. Ekadjati, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat*; Hernawan, "Cirebon Keraton In The Flow Of History (1452-1809 AD.);" Suparman, Sulasman, and Dadan Firdaus, "Political Dynamics in Cirebon from the 17th to 19th Century," *Tawarikh* 9, no. 1 (2017): 49–58; Jamil, "Perpecahan Keraton Cirebon."
26. Deviani, "Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M.-1755M.);" Bahru Rozi, "Sejarah Kesultanan Cirebon dan Problematikanya Tahun 1677-1752," *Batutah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 1, no. 1 (2022): 21–39; Mustaqim Asteja, "Pengaruh Erupsi Gunung Ciremai terhadap Morfologi Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Cirebon pada Masa Kolonial 1681 – 1942: The Effect of Mount

- Ciremai Eruption on the Spatial Morphology of Cirebon Port Area during the Colonial Period 1681-1942,” *Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat*, October 30, 2021, 117–27, <https://doi.org/10.24164/prosiding.v4i1.11>.
27. Farichin, Wawancara.
 28. Wira Fimansyah and Dyah Kumalasari, “Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Melalui Pembelajaran Sejarah di SMA Kebangsaan Yogyakarta,” *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah* 11, no. 1 (October 21, 2015), <https://doi.org/10.21831/istoria.v11i1.5766>.
 29. Farichin, Wawancara.
 30. Ignas Kleden, *Sutan Sjahrir: True Democrat, Fighter for Humanity, National Hero 1909–1966*. In: *Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan* (Brill, 2000); Mahdum, “Konflik Cina-Pribumi Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Industri Batik Di Trusmi 1948,” *Jurnal Tamaddun* 5, no. 2 (2017).
 31. Faviantio Farhan, Winny Gunarti Widya Wardani, and Febrianto Saptodewo, “Karakter Tokoh Ki Bagus Rangin Pahlawan Perang Kedondong di Cirebon,” *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya* 2, no. 02 (April 30, 2020): 96–102, <https://doi.org/10.30998/vh.v2i2.716>.
 32. Farichin, Wawancara; Aah Syafaah, “Memahami Bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat dalam Perang Kedondong (1802-1818 M),” *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 2 (November 30, 2020), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i2.7322>.
 33. Eva Suchi Adi Cahyani, “Ekspedisi Lintas Laut Jawa-Sulawesi Oleh ALRI Divisi VI Pasukan Seberang Tahun 1946-1947,” *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah* 3, no. 6 (2018): 747–60.
 34. Hilmy Fauzan and Azhari Amri, “Film Animasi Kapten Samadikun sebagai Pahlawan Samudra,” *Jurnal Desain* 7, no. 2 (April 29, 2020): 136, <https://doi.org/10.30998/jd.v7i2.5463>.
 35. Gunawan Santoso et al., “Filsafat Konten Nasionalisme, Patriotisme, dan Perjuangan Untuk Generasi Z Bangsa Indonesia” 02, no. 02 (2023).

Daftar Pustaka

- Adeng, Wiwi Kuswiah, Herry Wiryono, and Heru Erwantoro. *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutera*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Asteja, Mustaqim. "Pengaruh Erupsi Gunung Ciremai terhadap Morfologi Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Cirebon pada Masa Kolonial 1681 – 1942: The Effect of Mount Ciremai Eruption on the Spatial Morphology of Cirebon Port Area during the Colonial Period 1681-1942." *Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat*, October 30, 2021, 117–27. <https://doi.org/10.24164/prosiding.v4i1.11>.
- Atja, and Ayatrohaedi. *Carita Purwaka Caruban Nagari: Karya Sastra Sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah*. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1986.
- Aziz, M. Abdul. "The Principles of Islamic Polity in the Qur'an and Sunnah: Revisiting Modern Political Discourse." *Al-Burhān Journal of Qur'ān and Sunnah Studies* 7, no. 1 (2023): 5–28. <https://doi.org/10.31436/alburhn.v7i1.296>.
- Cahyani, Eva Suchi Adi. "Ekspedisi Lintas Laut Jawa-Sulawesi Oleh ALRI Divisi VI Pasukan Seberang Tahun 1946-1947." *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah* 3, no. 6 (2018): 747–60.
- Dahlan, M. Halwi. "Ronggeng Bugis dalam Tinjauan Sejarah Kebudayaan." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 4, no. 2 (June 1, 2012): 349. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v4i2.144>.
- Damanik, Khairul Ikhwan, Tikwan Raya Siregar, Ivo Nilasari, Ahmad Khairuddin, Norman Mufti, Gudo Siswoyo, Sutra Ningsih, Elfian Lubis, and Bungaran Antonius Simanjuntak. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah Dan Air Nusantara Milik Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Deviani, Firlinna Tiya. "Perjanjian 7 Januari 1681 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Politik Ekonomi di Kerajaan Cirebon (1681 M.-1755M.)." *Tamaddun* 4, no. 1 (2016): 123–46.
- Ekadjati, Edi S. *Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta*. Dunia Pustaka Jaya, 2017. ———. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat*. Bandung: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 1991.
- Erwantoro, Heru. "Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 4, no. 1 (2012): 170–83. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v4i1.130>.
- Farhan, Faviantio, Winny Gunarti Widya Wardani, and Febrianto Saptodewo. "Karakter Tokoh Ki Bagus Rangin Pahlawan Perang Kedondong di Cirebon." *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya* 2, no. 02 (April 30, 2020): 96–102. <https://doi.org/10.30998/vh.v2i2.716>.

- Farichin. Wawancara, November 15, 2021.
- Farid, Muhamad Miftah. "Perjuangan Sunan Gunung Djati dalam Penyebaran Islam di Jawa Barat." *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 7, no. 2 (December 30, 2022): 134. <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v7i2.5724>.
- Farihin, Farihin, Aah Syafaah, and Didin Nurul Rosidin. "Jaringan Ulama Cirebon Abad ke-19 Sebuah Kajian Berdasarkan Silsilah Nasab dan Sanad." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 7, no. 1 (June 28, 2019). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v7i1.4675>.
- Fauzan, Hilmy, and Azhari Amri. "Film Animasi Kapten Samadikun sebagai Pahlawan Samudra." *Jurnal Desain* 7, no. 2 (April 29, 2020): 136. <https://doi.org/10.30998/jd.v7i2.5463>.
- Fauziyah, Siti. "Kiprah Sunan Gunung Jati dalam Membangun Kekuatan Politik Islam di Jawa Barat" 13, no. 1 (2015).
- Fimansyah, Wira, and Dyah Kumalasari. "Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Melalui Pembelajaran Sejarah di SMA Kebangsaan Yogyakarta." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah* 11, no. 1 (October 21, 2015). <https://doi.org/10.21831/istoria.v11i1.5766>.
- Hamid, Solihin Ichas, Dinie Anggraeni Dewi, Andika Rizky Nugraha, Wahdini Rohmah Jaelani, and Yessi Vichaully. "Implementasi Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan Model Pembelajaran Role Playing di Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5, no. 6 (November 13, 2021): 5731–38. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1602>.
- Hardhi, Titan Rohkmutiana. "Dakwah Sunan Gunung Jati Dalam Proses Islamisasi Di Kesultanan Cirebon Tahun 1479-1568." *Risalah* 3, no. 11 (2016).
- Hernawan, Wawan. "Cirebon Keraton In The Flow Of History (1452-1809 AD)." *Jurnal Lektur Keagamaan* 21, no. 1 (2023): 289–324.
- Hidayat, Muhammad. "Analisis Framing Pemberitaan Daerah Istimewa Minangkabau di Media Online Tempo.co." *Komunika* 17, no. 2 (September 1, 2021): 15–29. <https://doi.org/10.32734/komunika.v17i2.7550>.
- Islamiati, Nindia Farah. "Strategi Penyebaran Islam Sunan Gunung Jati Melalui Politik Kesultanan Cirebon (1479-1568)." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Jamil, Budi Prasidi. "Perpecahan Keraton Cirebon." *Jurnal KALIJAGA* 2 (July 2013): 33–51.
- Kleden, Ignas. *Sutan Sjahrir: True Democrat, Fighter for Humanity, National Hero 1909–1966*. In: *Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan*. Brill, 2000.
- Mahdum. "Konflik Cina-Pribumi Dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Industri Batik Di Trusmi 1948." *Jurnal Tamaddun* 5, no. 2 (2017).

- Mantili. “Penerapan Metode Pembelajaran Problem Based Learning dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Sejarah Di Kelas X SMA PGRI-2 Palangka Raya.” *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 2 (2019): 37–47.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. “Politik (Legislasi) Hukum Islam di Malaysia.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2016): 123–38.
- Parwati, Ni Putu Yuniarika. “Penyerangan Sultan Agungke Batavia Terhadap Kondisi Politik Dan Ekonomi Mataram Tahun 1639-1646.” *Social Studies* 2, no. 2 (2014): 36–53.
- Rochmiatun, Endang. “Kedudukan Sejarah di Tengah Ilmu-ilmu Lain.” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 13, no. 1 (2013).
- Rozi, Bahru. “Sejarah Kesultanan Cirebon dan Problematikanya Tahun 1677-1752.” *Batutab: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 1, no. 1 (2022): 21–39.
- Santoso, Gunawan, Nabila Khairunnisa, Nursafa Azzahra, and Safira Aulia Adisti. “Filsafat Konten Nasionalisme, Patriotisme, dan Perjuangan Untuk Generasi Z Bangsa Indonesia” 02, no. 02 (2023).
- Sapitri, Ranni. “Jejak Emas Sriwijaya dan Majapahit dalam Perdagangan Maritim Asia.” *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 28, no. 2 (December 15, 2022): 104–22. <https://doi.org/10.30631/nazharat.v28i2.89>.
- Sucipto, Toto. “Eksistensi Keraton Di Cirebon: Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Keraton-Keraton Di Cirebon.” *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research* 2, no. 3 (2010): 472–89.
- Sulaiman, Setiadi. “Pendekatan konsep dalam pembelajaran Sejarah.” *Jurnal Sejarah Lontar* 9, no. 1 (2012): 9–21.
- Suparman, Sulasman, and Dadan Firdaus. “Political Dynamics in Cirebon from the 17th to 19th Century.” *Tawarikh* 9, no. 1 (2017): 49–58.
- Suryaman, E. *Jalan Hidup Sunan Gunung Jati Sejarah Faktual Dan Filosofi Kepemimpinan Seorang Pandhita-Raja*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2015.
- Syafaah, Aah. “Memahami Bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat dalam Perang Kedondong (1802-1818 M).” *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 2 (November 30, 2020). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i2.7322>.
- Yusuf, Himyari. “Eksistensi Dan Karakteristik Politik Islam Suatu Inspirasi Bagi Formulasi Politik Kontemporer.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 103–20.

Muhammad Sungaidi, *Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, Indonesia*; Email: muhammad.sungaidi@uinjkt.ac.id

Aktobi Ghozali, *Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, Indonesia*; Email: aktobi.ghozali@uinjkt.ac.id